

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN CIAMIS

Ary Mustamiin Muadz

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia
E-mail: arymustamiin27@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena implementasi kebijakan Sustainable Development Goals Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis belum optimal. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Sustainable Development Goals Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan, yang terdiri dari observasi dan wawancara. Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 orang, yang terdiri dari Kepala DPMD Kabupaten Ciamis, Pejabat Fungsional, Kabid Pemerintahan Desa, Pendamping Desa, dan Kepala Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan Sustainable Development Goals Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut karena masih adanya indikator yang belum sesuai dalam pelaksanaannya, diantaranya: masih rendahnya jangkauan perubahan yang diinginkan, belum mumpuninya pelaksana program, masih rendahnya sumber daya yang digunakan, kurangnya kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, serta masih rendahnya kepatuhan dan daya tanggap pelaksana.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, SDGs, Kesejahteraan Masyarakat*

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan telah diimplementasikan dalam berbagai skema yang pada dasarnya ditujukan untuk mencapai kesejahteraan manusia secara global. *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang muncul saat pertemuan pada tanggal 25-27 September 2015 di markas besar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), New York, Amerika Serikat. Acara tersebut merupakan lahirnya kesepakatan pengesahan dokumen SDGs yang

dihadiri perwakilan dari 193 Negara. Acara ini merupakan lanjutan dari kesepakatan dokumen SDGs pada tanggal 2 Agustus 2015 yang berlokasi di New York. Saat itu sebanyak 193 negara anggota PBB mengumumkan dokumen berjudul “*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*” atau “Mengalihrupakan Dunia Kita: Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.” Dokumen SDGs pun lahir untuk meneruskan dan

memantapkan capaian-capaian MDGs sebelumnya agar berlanjut hingga seterusnya. Kepala Negara dan Pemerintah yang menyepakati SDGs membuat komitmen bersama untuk menghapuskan kemiskinan, Menghilangkan kelaparan, memperbaiki kualitas kesehatan, meningkatkan pendidikan, dan mengurangi ketimpangan. Untuk mewujudkan hal tersebut, ada 17 agenda SDGs yang sudah disepakati. Untuk mencapai 17 tujuan tersebut, sudah dijabarkan menjadi 169 target dan 241 indikator yang tertuang dalam Dokumen SDGs 2030. Target dan tujuan SDGs dimaksudkan untuk mencapai hasil-hasil pembangunan yang menggambarkan adanya kemajuan dalam hal pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan dalam dan antar Negara, memperbaiki manajemen air dan strategi, dan mengambil langkah penting untuk mengatasi perubahan iklim. Hal ini tergambar dalam 4 pilar SDGs yaitu pilar ekonomi, pilar sosial, pilar hukum, pilar lingkungan.

Dalam negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan menjadi persoalan sosial yang terus muncul dan menjadi beban berat bagi Negara. Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang kompleks dan menjadi sebuah permasalahan besar yang harus segera ditanggulangi. Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di Indonesia adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin, pembangunan di Indonesia saat

ini sedang dihadapkan terhadap masalah kemiskinan. Pada umumnya di Negara berkembang seperti Indonesia permasalahan pendapatan yang rendah dengan masalah kemiskinan merupakan permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi. Tujuan dilaksanakannya pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian mengatasi berbagai permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan seperti pengangguran dan kemiskinan. Todaro dan Smith (2006: 75) menyatakan bahwa:

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum yang sesuai dengan tingkat kelayakan hidup. Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu 4 wilayah digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut.

Kemiskinan adalah keadaan dimana ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Permasalahan standar hidup yang rendah berhubungan dengan pendapatan yang rendah, perumahan yang kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang buruk, dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya sumber daya manusia dan banyaknya pengangguran.

Dalam hal ini, beberapa daerah di Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda dari sisi jumlah maupun persentasenya. Keadaan demografis, jumlah penduduk, hingga kebijakan daerah masing-masing dapat menjadi faktor yang mempengaruhi hal tersebut yang salah satunya adalah Kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat yang berpenduduk miskin di Indonesia, hal tersebut didorong oleh semakin banyaknya jumlah populasi penduduk. Sedangkan beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan di suatu daerah yaitu pengangguran, pendidikan telah membuat ribuan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, membiayai kesehatan, ketiadaan tabungan, tidak ada akses pelayanan ke publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial, kurangnya perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke Kota. Lebih jauh lagi kemiskinan telah membuat ribuan rakyat tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Didalam momentum Penyusunan RPJM Desa, DPMD memberikan arahan bahwa RPJM Desa harus mengacu pada SDGs bersama seluruh kecamatan dan

desa se-Kabupaten Ciamis. SDGs desa merupakan upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Setiap Desa di Kabupaten Ciamis disibukkan dengan pembuatan RPJM Desa yang didalamnya harus memuat dan berbasis pada pemutakhiran SDGs dan IDM saat ini sebagai langkah dalam ketepatan sasaran dalam implementasi RPJM Desa.

Secara umum Kabupaten Ciamis memiliki tantangan yang masih cukup berat dalam mencapai SDGs di Tahun 2030. Berdasarkan hasil observasi awal menunjukkan Kabupaten Ciamis memiliki skor sebesar 218 dan karena itu mendapatkan nilai C. Angka ini masih sedikit lebih tinggi dari angka skor rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang bernilai 216. Berdasarkan proyeksi nilai ini menjadikan Kabupaten Ciamis tidak bisa mengandalkan *business as usual* jika ingin mencapai SDGs di Tahun 2030.

Hal ini sejalan dengan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dalam implementasi kebijakan program SDGs belum optimal dalam pelaksanaannya, hal itu dapat dilihat

dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Belum efektifnya pengoptimalan dalam pengendalian program-program pemberdayaan yang ada di wilayah, hal tersebut dapat dilihat dari 11 program unggulan Bupati dalam perencanaan pembangunan daerah yang masih multi tafsir dan belum dilaksanakan secara utuh.
2. Kinerja aspek pelayanan pemberdayaan mengenai SDGs yang masih rendah dan terbatas, contohnya terlihat dari masih kurangnya sosialisasi atau penyampaian informasi mengenai SDGs secara eksplisit dan proporsional.
3. Lemahnya pendekatan partisipatif dari atas-bawah dalam perencanaan pembangunan daerah, karena seyogyanya pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sudah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, artinya perencanaan pembangunan di Kabupaten Ciamis belum mencerminkan kondisi objektif sebenarnya, jika disesuaikan dengan prioritas visi-misi Bupati beserta 11 program unggulannya. Kabupaten Ciamis memiliki tantangan yang masih cukup berat dalam mencapai SDGs di tahun 2030.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi kebijakan *Sustainable Development Goals* Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis?”.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan merupakan cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuan dimana sebuah kebijakan publik yang telah diatur akan berfungsi apabila diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Tresiana dan Duadji (2019: 11) menyatakan bahwa:

Implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses kebijakan publik dalam menerapkan atau melaksanakan segala bentuk keputusan, program, dan proyek yang telah ditentukan yang jugamempunyai kepentingan sebagai faktor penentu kegagalan atau keberhasilandari suatu kebijakan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan.

Selanjutnya, Mazmanian dan Sabatier dalam (Wahab, 2014: 123) menjelaskan konsep implementasi kebijakan sebagai berikut:

Di dalam mempelajari implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dijalankan atau dirumuskan, yakni peristiwa- peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan Negara, baik itu menyangkut usaha- usaha

pengadministrasian maupun juga usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa.

Menurut Budihardjo dalam (Muthmainnah, et al, 2020: 57) pada dasarnya *Sustainable development* adalah:

Pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan kemampuangenerasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagai suatu proses perubahan dimana pemanfaatan sumberdaya, arah investasi, orientasi pembangunan dan perubahan kelembagaan selalu dalam keseimbangan dan secara sinergis saling memperkuat potensi masa kini maupun masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.

Di lain pihak, Trifita dan Amaliyah (2020: 65) menyatakan bahwa: Pada hakekatnya pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk memperoleh pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang.

Lebih lanjut, Grindle dalam (Tresiana dan Duadji, 2019: 59) menyampaikan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri atas:

1. Isi kebijakan (*content of policy*) yang meliputi:

- a. Kepentingan yang Terpengaruhi oleh kebijakan
 - b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
 - c. Derajat perubahan yang diinginkan
 - d. Kedudukan pembuat kebijakan
 - e. Siapa pelaksana program
 - f. Sumber daya yang dikerahkan
2. Lingkungan implementasi (*context of implementation*) yang meliputi:
 - a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
 - b. Karakteristik lembaga dan penguasa
 - c. Kepatuhan dan daya tanggap

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 orang, yang terdiri dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, Pejabat Fungsional, Kepala Bidang Pemerintahan Desa .

Pendamping Desa, dan Kepala Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Selanjutnya

setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui implementasi kebijakan *Sustainable Development Goals* Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis ditinjau berdasarkan dua dimensi tingkat keterlaksanaan keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle dalam (Tresiana dan Duadji, 2019: 59), yaitu sebagai berikut:

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan menghendaki perubahan besar, akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran, maupun dari implementornyayang merasa sulit melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Dalam hal ini, kebijakan *Sustainable Development Goals* Desa harus memenuhi semua unsur dari isi kebijakan agar pelaksanaannya dapat berhasil. Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakantersebut terdiri dari indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program
Berdasarkan hasil penelitian di

lapangan dapat diketahui bahwa kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program *Sustainable Development Goals* Desa sudah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut terlihat dari setiap program pembangunan yang dilaksanakan adalah untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis tercantum bahwa kelompok sasaran pembangunan berkelanjutan adalah masyarakat. Selain itu, prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 yaitu dimanfaatkan untuk menggali potensi-potensi dan mengurangi angka kemiskinan di desa demi terciptanya kesejahteraan masyarakat, misalnya dengan memberikan berbagai bantuan bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, adanya implementasi kebijakan *Sustainable Development Goals* Desa merupakan perwujudan untuk memenuhi kepentingan masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Grindle dalam (Abdal, 2015: 132) bahwa:

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan sangat tergantung pada kepentingan-kepentingan yang ada pada kebijakan tersebut. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pastimelibatkan

banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian bahwa adanya kepentingan yang dipengaruhi oleh program *Sustainable Development Goals* Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis. Hal ini karena secara keseluruhan kebijakan *Sustainable Development Goals*

Desa diperuntukkan bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat. Misalnya dalam mencapai tujuan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Pemerintah Desa di Kabupaten Ciamis telah melakukan upaya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan Padat Karya Tunai Desa. Dalam hal ini, implementasi kebijakan harus mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat luas. Suatu kebijakan akan berhasil apabila mendapat dukungan luas dari masyarakat sebagai kelompok sasaran dari adanya program. Suatu kebijakan akan mendapat dukungan yang luas dari kelompok sasarannya jika kebijakan tersebut mewakili kepentingan-kepentingannya.

b. Jenis manfaat yang dihasilkan Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa jenis manfaat yang dihasilkan dari adanya implementasi kebijakan *Sustainable Development Goals* Desa sudah dapat dirasakan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya program SDGs Desa terutama dalam tujuan

mengentaskan kemiskinan, misalnya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan manfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sebagaimana menurut Grindle dalam (Abdal, 2015: 132) bahwa 'Suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan'.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian bahwa adanya jenis manfaat yang dihasilkan dari implementasi kebijakan *Sustainable Development Goals* Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis, hal tersebut karena dari 18 tujuan SDGs Desa, yaitu Desa tanpa kemiskinan, Desa tanpa kelaparan, Desa sehat dan sejahtera, pendidikan Desa berkualitas, kesetaraan gender, Desa layak air bersih dan sanitasi, Desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi Desa dan pekerjaan yang layak, infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan, Desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan, Desa tanggap terhadap iklim, Desa peduli lingkungan laut, Desa peduli lingkungan darat, Desa damai dan berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, dan kelembagaan

desa dinamis dan budaya desa adaptif akan menghasilkan berbagai jenis manfaat dan dampak positif bagi masyarakat. Dalam hal ini, yang paling penting adalah bagaimana pengimplementasian kebijakannya di lapangan, apabila kebijakan tersebut berhasil maka manfaatnya pun akan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran dari kebijakan tersebut.

c. Jangkauan perubahan yang diinginkan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa jangkauan perubahan yang diinginkan dari adanya kebijakan *Sustainable Development Goals* Desa belum terlaksana dengan maksimal, hal tersebut terlihat dari hasil perolehan skor capaian SDGs Desa di Kabupaten Ciamis salah satunya yaitu Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis belum mencapai target capaian yang diinginkan, yakni capaian keseluruhannya hanya mencapai 48.98%.

Grindle dalam (Abdal, 2015: 132) menyatakan bahwa:

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian bahwa jangkauan perubahan yang diinginkan dari kebijakan *Sustainable Development Goals* Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis belum terlaksana dengan baik, hal tersebut karena rata-rata Desa di Kabupaten Ciamis belum mencapai jangkauan atau target SDGs Desa yang telah ditetapkan sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan penyesuaian kembali.

d. Kedudukan pengambilan keputusan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa kedudukan pengambilan keputusan kebijakan *Sustainable Development Goals* Desa sudah terlaksana dengan baik, hal tersebut terlihat dari belum meratanya pembangunan di Kabupaten Ciamis terutama dalam sektor perekonomian sehingga implementasi kebijakan SDGs Desa ini adalah suatu program yang tepat dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada melalui 18 tujuan SDGs Desa.

Sebagaimana menurut Grindle dalam (Abdal, 2015: 132-133) bahwa:

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

Dengan demikian, berdasarkan

hasil penelitian bahwa kedudukan pengambilan keputusan kebijakan *Sustainable Development Goals* Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis sudah sesuai, hal tersebut karena pada prinsipnya pengambilan keputusan mengenai SDGs Desa ini sudah tepat terlebih lagi apabila dalam pelaksanaannya dilakukan secara maksimal sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

e. Pelaksana program

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa pelaksana program *Sustainable Development Goals* Desa belum berjalan dengan baik, hal tersebut terlihat dari masih minimnya pengetahuan dan kemampuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis maupun Pemerintah Desa Utama dalam melaksanakan program SDGs Desa sehingga belum mampu mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan, misalnya belum adanya sikap kreatif dan adaptif dalam menyusun strategi pelaksanaan SDGs Desa.

Grindle dalam (Abdal, 2015: 133) menyatakan bahwa:

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini sudah harus terpapar atau

terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksana program *Sustainable Development Goals* Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis belum maksimal, hal tersebut karena pelaksana program diantaranya pihak DPMD Kabupaten Ciamis dan Pemerintah Desa Utama belum memiliki kompetensi yang mumpuni sehingga pelaksanaan program dalam mencapai 18 tujuan SDGs Desa pun belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Akan tetapi, implementor kebijakan SDGs ini telah dengan rinci tercantum dalam berbagai peraturan, salah satunya dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

f. Sumber daya yang digunakan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis belum memadai, hal tersebut dibuktikan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang mumpuni, misalnya terkait pengoptimalan dalam pengendalian program-program pemberdayaan yang ada di wilayah, hal tersebut dapat dilihat dari sebelas program unggulan Bupati dalam

perencanaan pembangunan daerah yang masih multi tafsir dan belum dilaksanakan secara utuh. Sedangkan untuk sumber daya finansial atau anggaran yang terbatas dibutuhkan skala prioritas dalam pemanfaatannya sehingga dapat tetap menunjang pelaksanaan suatu program dengan baik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 yaitu penentuan prioritas penggunaan dana desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam yang mendukung SDGs Desa.

Sebagaimana menurut Grindle dalam (Abdal, 2015: 133) bahwa: Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Selanjutnya, Edwards III dalam (Mulyadi, 2014: 99) menjelaskan bahwa: Setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah

program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian bahwa belum memadainya sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis, hal tersebut karena masih minimnya kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana atau implementor sehingga kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kualitas SDM sehingga dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan program SDGs Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi-potensi dan sumber daya yang ada di desa.

2. Lingkungan Implementasi (Context of Implementation)

Lingkungan atau konteks implementasi juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya karena baik mudahnya kebijakan maupun dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada

implementornya. Karakter dari pelaksana akan mempengaruhi tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi, dan kepentingan pribadi yang ingin dicapai. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk membelokkan sesuatu yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya. Lingkungan implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan terdiri dari indikator-indikator sebagai berikut:

a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat dalam kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan baik, hal tersebut terlihat dari masih kurangnya strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan suatu program, misalnya dalam program penguatan ekonomi desa seperti pengembangan BUMDes, pemberdayaan UMKM, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan lain sebagainya belum sepenuhnya mampu membantu peningkatan perekonomian masyarakat, terlebih

lagiterkait pemberian bantuan masih adanya ketidaktepatan sasaran sehingga perlu dirumuskan kembali strategi yang dianggap efektif untuk mengatasinya.

Sebagaimana menurut Grindle dalam (Abdal, 2015: 133) bahwa: Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian bahwa kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat dalam kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan maksimal, hal tersebut karena belum adanya strategi yang dianggap efektif dalam pelaksanaan SDGs Desa sehingga hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan.

b. Karakteristik lembaga dan rezim penguasa

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa karakteristik lembaga dan rezim penguasa dalam kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis

sudah berjalan dengan baik, hal tersebut terlihat dari adanya dukungan dari setiap kelembagaan SDGs Desa dan adanya peraturan-peraturan yang mengatur pelaksanaan SDGs Desa.

Sebagaimana menurut Grindle dalam (Abdal, 2015: 133) bahwa 'Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, makarakteristik dari suatu lembaga dan rezim kekuasaan akan turut mempengaruhi suatu kebijakan'.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian bahwa karakteristik lembaga dan rezim penguasa dalam kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut karena adanya dukungan dari lembaga-lembaga terkait SDGs Desa dan peraturan-peraturan pelaksanaan SDGs Desa sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi SDGs Desa demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

c. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa kepatuhan dan daya tanggap pelaksana kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan baik, hal tersebut terlihat dari masih adanya pegawai DPMD Kabupaten Ciamis

yang kurang disiplin dan kurang tanggapnya pelaksana SDGs Desa dalam mengatasi suatu permasalahan misalnya terkait pemutakhiran data SDGs Desa yang mengalami berbagai kendala sehingga tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Padahal pendataan ini merupakan tahap awal guna mengetahui potensi-potensi dan permasalahan-permasalahan yang ada di desa untuk merealisasikan program SDGs Desa yang nantinya menjadi bahan acuan untuk menentukan arah pembangunan berkelanjutan di desa.

Sebagaimana menurut Grindle dalam (Abdal, 2015: 133-134) bahwa: Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian bahwa kepatuhan dan daya tanggap pelaksana kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan baik, hal tersebut karena masih kurangnya kedisiplinan dan ketanggapan dari DPMD Kabupaten Ciamis dalam mengatasi permasalahan suatu program sehingga program SDGs Desa belum dapat terlaksana dengan baik.

KESIMPULAN

Dimensi isi kebijakan (*content of policy*) *Sustainable Development Goals* Desa belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari masih rendahnya jangkauan perubahan yang diinginkan, belum mumpuninya pelaksana program, dan belum memadainya sumber daya yang digunakan. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam isi kebijakan SDGs Desa yaitu masih terbatasnya data masalah dan potensi Desa yang dibutuhkan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan karena pemutakhiran data SDGs Desa belum rampung dan masih dalam proses transisi, dinamika dan perkembangan dalam proses pemberdayaan desa dengan konsep SDGs Desa masih bersifat adaptif dan perlu fokus memahami substansi dalam waktu yang panjang, serta minimnya pengetahuan dan keahlian Pemerintah Desa terkait pelaksanaan SDGs Desa. Adapun upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan mengacu kepada data Indeks Desa Membangun (IDM) yang dimiliki oleh Desa, memberikan arahan tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan pemutakhiran data SDGs Desa, serta dilaksanakannya kegiatan sosialisasi mengenai SDGs Desa.

Dimensi lingkungan implementasi (*context of implementation*) kebijakan *Sustainable*

Development Goals Desa belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat dan masih rendahnya kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam lingkungan implementasi kebijakan SDGs Desa yaitu kurangnya kerja sama dari para *stakeholder* dan kurangnya kesadaran dan motivasi dari pelaksana SDGs Desa. Adapun upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dilaksanakannya pendekatan dan konsolidasi diantara kelembagaan-kelembagaan SDGs Desa sehingga terciptanya kerja sama dan harmonisasi yang baik dan melaksanakan pembinaan dan evaluasi untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Mulyadi, D. (2014). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Muthmainnah, L., et al. (2020). *Meninjau Ulang Sustainable*

- Development: Kajian Filosofis atas Dilema Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Post Modern. Jurnal Filsafat*, 30(1), 23-45.
- Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
- Todaro, M.P. dan Smith, S.C. (2006). *Pembangunan Ekonomi: Jilid I Edisi Kesembilan. Haris Munandar (penerjemah)*. Jakarta: Erlangga.
- Tresiana dan Duadji. 2019. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Trifita, A. dan Amaliyah, R. (2020). *Ruang Publik dan Kota Berkelanjutan: Strategi Pemerintah Kota Surabaya Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs, Global & Policy*. 8(2).
- Wahab, A. (2014). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.